

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : **INDRIASTUTI**

**Tempat & Tanggal Lahir** : **Surakarta, 24 November 1960**

**Jenis Kelamin** : **Perempuan**

**Kebangsaan** : **Indonesia**

**Agama** : **Kristen**

**Alamat Rumah** : **Jl. Cililin IV/ 50, Kebayoran Baru  
Jakarta 12170**

**Pekerjaan** : **Pegawai Kantor Konsultan/Akuntan Publik –  
Ernst & Young Indonesia**

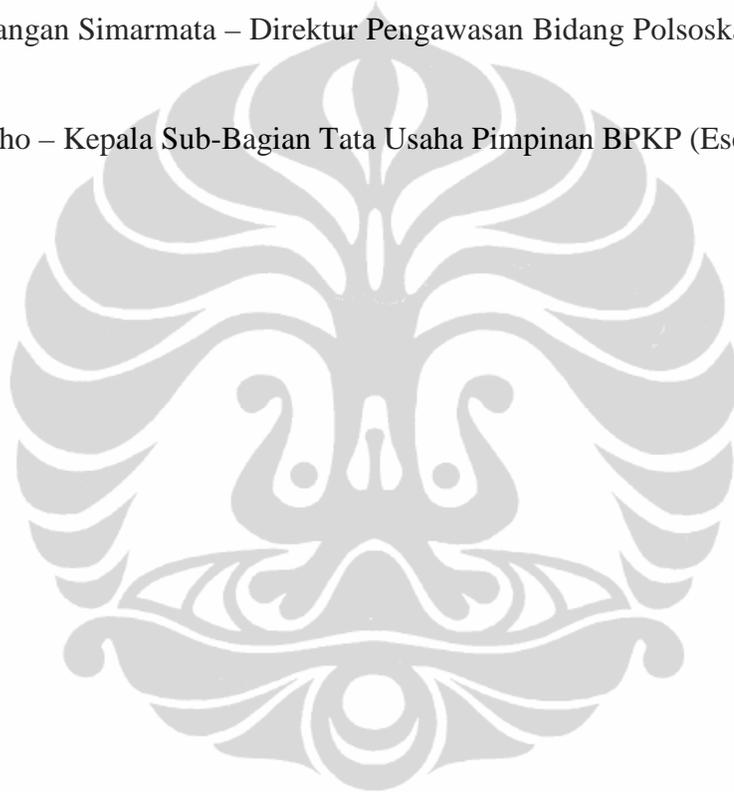
**Alamat Kantor** : **Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 13  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190**

**Riwayat Pendidikan** :

- 1. SD Negeri No. 19, Surakarta : 1965 - 1971**
- 2. SMP Kanisius II, Surakarta : 1971 - 1974**
- 3. SMA Kanisius Petang, Surakarta : 1974 - 1977**
- 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 1978 - 1986**  
**Bidang Studi Administrasi Negara**  
**Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

## DAFTAR NARA SUMBER/ INFORMAN

1. Ani Sri Maharsi, Ak.MSc. – Direktur, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan (Eselon II)
2. Dr. Meidyah Indreswari – Kepala Perwakilan BPKP DKI II (Eseleon II)
3. Drs. Hamonangan Simarmata – Direktur Pengawasan Bidang Polsoskam – BPKP (Eselon II)
4. Setyo Nugroho – Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pimpinan BPKP (Eselon IV)



## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KANTOR BPKP

### A. Sejarah singkat BPKP

1. Bagaimana penjelasan singkat sejarah perkembangan BPKP dari sejak berdirinya sampai sekarang? (fungsi, peran, status kelembagaan, struktur organisasi, dll.)

### B. BPKP terkait dengan Keppres lama (Keppres 103 tahun 2003)

2. Bagaimana peran, fungsi BPKP berdasarkan Keppres lama?
3. Bagaimana Tupoksi saat itu?
4. Knowledge dan kapasitas BPKP dalam pelaksanaannya saat itu, misalnya pengetahuan dan kapasitas yang terfokus pada peran sebagai auditor?

### C. BPKP sesudah adanya PP 60 tahun 2008

5. Bagaimana BPKP saat menjalankan fungsi dan perannya sejak adanya PP 60 tahun 2008?
6. Bagaimana penjelasan tentang Tupoksi yang berlandaskan pada PP 60 tahun 2008?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan peran BPKP sejauh ini menurut Bapak/Ibu? Apakah masih mengalami kendala di lapangan?
8. Bagaimana bisa dijelaskan adanya suatu knowledge/disiplin ilmu yang baru bagi semua jajaran staff BPKP saat ini, apabila dibandingkan dengan yang dulunya lebih pada pengetahuan terkait dengan tugas auditor?
9. Apakah bisa dijelaskan hal-hal yang merupakan kebutuhan yang timbul dengan adanya pelaksanaan PP 60 tahun 2008:
  - (1) Apa peran BPKP sekarang sudah sesuai dengan PP 60 tahun 2008?
  - (2) Menurut Bapak/Ibu apakah BPKP perlu melakukan upaya strategis atas perannya sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden? Apakah upaya

tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya Reposisi atau revitalisasi?

- (3) Bagaimana kualitas yang diperlukan oleh BPKP untuk menjalankan fungsinya sesuai PP 60 tahun 2008 yang baru?
  - (4) Apakah ada kebutuhan terkait dengan SDM?
  - (5) Bagaimana keadaan SDM yang ada, apakah sesuai dengan kebutuhan? Kalau masih kurang memadai, apakah ada usaha untuk pemenuhannya, misalkan dengan perekrutan, pelatihan dan pendidikan staff?
10. Secara keseluruhan, apa yang masih menjadi kendala yang belum teratasi apabila dipandang perlu adanya usaha revitalisasi BPKP?
11. Sejauh mana BPKP sudah melakukan usaha menyeluruh, termasuk dalam hal penguatan SDM-nya, sedemikian rupa hingga BPKP menjalankan fungsi strategis sebagai auditor internal pemerintah?

**D. Bagaimana arah BPKP yang diinginkan ke depannya?**

12. Bagaimana Bapak/Ibu bisa menjelaskan tentang peran BPKP saat ini, dalam melaksanakan tugas sebagai Auditor Presiden?
13. Apakah menurut Bapak/Ibu BPKP sudah optimal menjalankan tugas dan perannya tersebut di atas?
14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan peran BPKP sejauh ini menurut Bapak/Ibu?
15. Apakah ada kendala-kendala apa yg dihadapi BPKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama ini?
16. Bagaimana penjelasan Bapak/Ibu tentang kompetensi BPKP sejauh ini?
17. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang posisi BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah? Bagaimana arah status kelembagaannya?
18. Menurut Bapak/Ibu, hal apa saja yang bisa mendukung optimalisasi peran dan fungsi BPKP? (dari segi **SDM, landasan hukum kelembagaan, strategi organisasi, manajemen perubahan, dll.**)

## HASIL WAWANCARA TERTULIS

Nara Sumber:

Ibu Ani Sri Maharsi, Ak.Msc. – Direktur, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan  
(Pejabat Eselon II)

### A. Sejarah singkat BPKP

1. Bagaimana penjelasan singkat sejarah perkembangan BPKP dari sejak berdirinya sampai sekarang? (fungsi, peran, status kelembagaan, struktur organisasi, dll.)

Jawaban:

Merujuk pada keterangan di website BPKP.

### B. BPKP terkait dengan Keppres lama (Keppres 103 tahun 2003)

2. Bagaimana peran, fungsi BPKP berdasarkan Keppres lama?

Jawaban:

Berdasarkan kepres lama, fungsi BPKP sebagai auditor pengawasan keuangan dan pembangunan

3. Bagaimana Tupoksi saat itu?

Jawaban:

Menjadi auditor internal Pemerintah, mengawasi seluruh kementerian dan lembaga termasuk BUMN/D

4. Knowledge dan kapasitas BPKP dalam pelaksanaannya saat itu, misalnya pengetahuan dan kapasitas yang terfokus pada peran sebagai auditor?

Jawaban:

Ya, basically ilmu nya audit. , accounting

### C. BPKP sesudah adanya PP 60 tahun 2008

5. Bagaimana BPKP saat menjalankan fungsi dan perannya sejak adanya PP 60 tahun 2008?

Jawaban: BPKP, menjadi pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara (pasal 49 PP 60)

6. Bagaimana penjelasan tentang Tupoksi yang berlandaskan pada PP 60 tahun 2008?

Jawaban: Pasal 49 dan penjelasannya

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan peran BPKP sejauh ini menurut Bapak/Ibu? Apakah masih mengalami kendala di lapangan?

Jawaban: Ya, persepsi pengguna anggaran, baik pimpinan kementerian/lembaga belum sepenuhnya sama, baik sebagai pihak yang bertanggungjawab menggunakan anggaran harus berakuntabilitas kepada Presiden sebagai penanggungjawab akhir akuntabilitas keuangan negara.

8. Bagaimana bisa dijelaskan adanya suatu knowledge/disiplin ilmu yang baru bagi semua jajaran staff BPKP saat ini, apabila dibandingkan dengan yang dulunya lebih pada pengetahuan terkait dengan tugas auditor?

Jawaban: Ya, karena BPKP sifat tugasnya lebih makro (pengawasan lintas sektoral) maka perlu disiplin ilmu makro dan mikro, tidak hanya akuntansi dan auditing,

9. Apakah bisa dijelaskan hal-hal yang merupakan kebutuhan yang timbul dengan adanya pelaksanaan PP 60 tahun 2008:

(1) Apa peran BPKP sekarang sudah sesuai dengan PP 60 tahun 2008?

Jawaban: Belum optimal karena

- a. persepsi yang belum sama
- b. sosialisasi masih kurang
- c. Landasan hukum masih belum kuat krn belum ada Perpres tentang BPKP

(2) Menurut Bapak/Ibu apakah BPKP perlu melakukan upaya strategis atas perannya sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden? Apakah upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya Reposisi atau revitalisasi?

Jawaban: Lebih kepada upaya revitalisasi peran BPKP, meski responden satunya menyatakan dua duanya

- (3) Bagaimana kualitas yang diperlukan oleh BPKP untuk menjalankan fungsinya sesuai PP 60 tahun 2008 yang baru?

Jawaban:

Ya, perlu disiplin ilmu yang lain seperti makro ekonomi dan mikro ekonomi

- (4) Apakah ada kebutuhan terkait dengan SDM?

Jawaban: Ya, perlu penambahan kuantitas dan kualitas SDM

- (5) Bagaimana keadaan SDM yang ada, apakah sesuai dengan kebutuhan? Kalau masih kurang memadai, apakah ada usaha untuk pemenuhannya, misalkan dengan perekrutan, pelatihan dan pendidikan staff?

Jawaban:

Dengan diklat, workshop, pengiriman tenaga ke luar negeri dan dalam negeri (sekolah)

11. Secara keseluruhan, apa yang masih menjadi kendala yang belum teratasi apabila dipandang perlu adanya usaha revitalisasi BPKP?

Jawaban: Kendalanya adalah sebagai berikut:

- a. persepsi yang belum sama ttg akuntabilitas keuangan negara
- b. sosialisasi masih kurang
- c. landasan hukum belum kuat

12. Sejauh mana BPKP sudah melakukan usaha menyeluruh, termasuk dalam hal penguatan SDM-nya, sedemikian rupa hingga BPKP menjalankan fungsi strategis sebagai auditor internal pemerintah?

Jawaban: Sama dengan no 8

#### **D. Bagaimana arah BPKP yang diinginkan ke depannya?**

13. Bagaimana Bapak/Ibu bisa menjelaskan tentang peran BPKP saat ini, dalam melaksanakan tugas sebagai Auditor Presiden?

Jawaban: Masih terkendala, belum optimal karena 3 hal tsb di atas

14. Apakah menurut Bapak/Ibu BPKP sudah optimal menjalankan tugas dan perannya tersebut di atas?

Jawaban: Belum, karena 3 hal tsb di atas.

15. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan peran BPKP sejauh ini menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Karena belum ada landasan hukum yang kuat, BPKP masih mengandalkan permintaan dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

16. Apakah ada kendala-kendala apa yg dihadapi BPKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama ini?

Jawaban: Ya, masih ada penolakan-penolakan di beberapa tempat

17. Bagaimana penjelasan Bapak/Ibu tentang kompetensi BPKP sejauh ini?

Jawaban: Kompetensi sudah cukup memadai, meski perlu dipertajam dengan pengetahuan dan disiplin ilmu baru yang lebih makro

18. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang posisi BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)? Bagaimana arah status kelembagaannya?

Jawaban: BPKP sebagai pembina APIP lanilla, status kelembagaan Lembaga Pemerintah Non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden

19. Menurut Bapak/Ibu, hal apa saja yang bisa mendukung optimalisasi peran dan fungsi BPKP? (dari segi SDM, landasan hukum kelembagaan, strategi organisasi, manajemen perubahan, dll.)

Jawaban: Untuk SDM, BPKP melakukan usaha peningkatan jumlah dan kualitasnya (sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya)

Dari segi landasan hukum: Penyusunan draft Perpres sudah dilakukan, dan sekarang sudah diajukan ke kantor Presiden. Oleh karena itu BPKP mengharapkan bahwa draft Perpres tentang BPKP segera disetujui untuk diterbitkan.

Strategi organisasi: memposisikan sebagai auditor presiden

Manajemen perubahan: merubah paradigma pihak eksternal maupun internal BPKP sendiri, bahwa BPKP tidak hanya audit namun memiliki tugas baru sesuai

dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan  
Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008

Sistem: Ada manajemen TAPKIN (Ketetapan Kinerja)

Gaya Kepemimpinan: *Directive Leadership* dan  
*Participative Management style*.



## TRANSKRIP WAWANCARA MELALUI TELEPON

Nara Sumber: Ibu Dr. Meidyah Indreswari – Kepala Perwakilan BPKP DKI II  
(Pejabat Eselon II)

Tanggal : Agustus 2008

TOPIK: REVITALISASI PERANNYA SEBAGAI BADAN  
PENGAWASAN  
INTERNAL YANG STRATEGIS?

Wawancara dilaksanakan dalam kesempatan yang berbeda, baik melalui telepon maupun secara tertulis, sejak tahun 2008. Transkrip jawaban narasumber memang tidak secara harafiah persis, tetapi dalam menyalin kembali penulis berusaha tetap obyektif dan tidak mengurangi arti dan substansi pernyataan narasumber. Transkrip hasil wawancara sebagai berikut:

Pembukaan wawancara:

Selamat sore Ibu Iin, sebelumnya saya ucapkan terimakasih telah memberikan waktu untuk wawancara dengan saya. Boleh tahu berapa lama waktu yang disediakan saat ini?

Jawab:

Ya, silahkan saja memanfaatkan waktu yang ada, tapi mungkin kali ini tidak bisa agak lama ya, saya mau berangkat dinas ke luar kota sore ini. Yaa, kurang lebih 15-20 menit? Bisa nyambung ke e-mail kalau masih belum cukup datanya. Begitu ya?

Baik, Bu Iin, saya langsung saja ke inti pertanyaan.

1. Tentang peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah (Presiden), bagaimana Bu Iin menjelaskan hal ini?

Jawab:

Pertama saya perlu menjelaskan tentang optimalisasi peran BPKP. Uang adalah instrumen pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada rakyat Indonesia dalam ini melalui DPR-RI dan MPR-RI. Untuk mempertanggungjawabkan tersebut, yang berarti bagaimana akuntabilitas Presiden dilaksanakan, Presiden membutuhkan informasi dan feedback atas pengelolaan uang negara yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.

BPKP sesuai kompetensinya adalah alat Presiden dalam memberikan informasi hasil pengawasan secara komprehensif, lintas regional dan lintas sektoral. Melihat konstelasi kedudukan, tugas dan fungsi instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, maka hanya BPKP-lah yang

relevan dapat memberikan feedback kepada Presiden dalam rangka mengawal dan mendampingi proses pengelolaan keuangan negara. Dari sinilah maka BPKP sudah beberapa saat melakukan berbagai usaha dalam rangka merevitalisasi diri agar dapat berfungsi dengan optimal dan strategis.

2. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana revitalisasi yang dilakukan oleh BPKP itu?

Jawab:

BPKP bukan lagi sebagai katalisator, melainkan menjadi auditor internal pemerintah yang profesional. Dalam hal ini, maka BPKP mengadakan upaya dalam menajamkan visi, misi dan strateginya.

3. Bagaimanakah strategi BPKP dalam upaya revitalisasi ini?

Strategi BPKP adalah,

- yang pertama: memposisikan pada area preventif melalui evaluasi kebijakan;
- yang kedua: melakukan audit represif bila terdapat indikasi yang perlu pendalaman yang menyangkut aspek non *Pro Justisia*, dalam hal ini berarti dilakukan tindakan korektif kepada manajemen. Kemudian aspek *Pro Justisia*, yaitu bahwa law enforcement diserahkan kepada pihak penegak hukum.
- Strategi ketiga adalah berupa program pre-emptive dan edukasi. Hal ini dilaksanakan melalui penyebaran model-model pengendalian manajemen yang dihasilkan oleh BPKP.

4. Apakah ketiga strategi tersebut sudah memadai dalam upaya revitalisasi?

Jawab:

Saya bisa mengatakan bahwa selain melakukan upaya berdasarkan strategi tadi, BPKP juga memiliki berbagai inisiatif dalam hubungannya dengan akuntabilitas Presiden, seperti yang saya sebutkan di awal pembicaraan ini. Inisiatif tersebut antara lain:

- Membantu pemerintah pusat dan daerah agar laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah tidak *disclaimer*.
- Kemudian, dalam hal pengawasan, BPKP melakukan juga apa yang disebut pengawasan investigatif. Hal ini dilakukan oleh BPKP yang bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia). Misi khusus untuk pengawasan investigatif ini adalah agar BPKP diberi kewenangan menerbitkan Sertifikasi & Akreditasi Forensik Auditor, sehingga pemberi keterangan ahli BPKP berakreditasi.

- BPKP melakukan identifikasi bentuk atau format laporan yang diperlukan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) BPKP. Stakeholder itu antara lain adalah Presiden, Menteri Penertiban Aparatur Negara (MenPAN & menteri lainnya).
- BPKP sebagai Pusat Informasi Hasil Pengawasan Internal Pemerintah Secara Nasional.
- BPKP menyampaikan tugas-tugas penting dan kendala yang dihadapi daerah.
- BPKP meningkatkan fungsi *public relations* agar unjuk kerjanya diketahui oleh berbagai pihak, terkait dengan akuntabilitas yang saya sebutkan sebelumnya.

Ya, sepertinya saya sudah menjelaskan secara lengkap ya? Kalau masih ada yang kurang jelas, pertanyaannya di-email saja. Sebentar lagi saya harus siap-siap ke Bandara.

5. Kalau begitu maaf, saya ajukan pertanyaan terakhir untuk kesempatan ini, bagaimana arah BPKP yang diinginkan ke depannya?

Jawab:

Intinya, dengan usaha revitalisasi yang sedang *in-progress* ini, BPKP akan dapat lebih bersinergi secara efektif dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Tentu saja dalam hal ini BPKP memerlukan dukungan kewenangan yang kuat. Selain itu, diharapkan ke depannya BPKP akan memiliki kompetensi, integritas, dan daya saing yang tinggi. Dengan demikian, upaya revitalisasi BPKP benar-benar akan membuat BPKP bisa secara optimal melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008. Maka pengawalan terhadap akuntabilitas Presiden akan terlaksana, yang pada akhirnya akan menciptakan *clean and good governance* dalam penyelenggaraan keuangan negara.

Baik, Ibu Iin. Saya sampaikan banyak terimakasih atas waktu dan penjelasannya. Selamat melanjutkan tugas.